



EKONOMI BIRU **UNTUK**
INDONESIA EMAS



VISI DAN MISI

PANGKALAN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN TUAL

Visi Pangkalan Pengawasan SDKP Tual:

“Mewujudkan Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Kawasan Timur Indonesia Secara Tertib dan Bertanggung Jawab”

Adapun **Misi** Pangkalan Pengawasan SDKP Tual:

1. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku;
2. Meningkatkan penataan dan penegakan hukum dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
3. Meningkatkan apresiasi dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan dan perikanan;
4. Mendukung pemerintah daerah dalam usaha meningkatkan pendapatan daerah dengan merangsang masuknya investor di bidang kelautan dan perikanan.

SEJARAH SINGKAT BERDIRINYA PANGKALAN PSDKP TUAL

Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Tual dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.04/MEN/2006 sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) setingkat Eselon IV.a. Pembentukan ini bertujuan untuk mendukung pelaksanaan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan secara lebih efektif, operasional, dan mandiri.

Keberadaan UPT ini juga didasarkan pada persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor B/2712/M.PAN/12/2005, dengan maksud memperpendek rentang kendali pengawasan yang sebelumnya terpusat pada Direktorat Jenderal PSDKP. Dengan demikian, pengawasan di daerah, khususnya wilayah Tual dan sekitarnya, dapat dilakukan lebih optimal.

Seiring meningkatnya aktivitas illegal fishing, terutama di kawasan Indonesia Timur, pada tahun 2017 status kelembagaan Stasiun PSDKP Tual ditingkatkan menjadi Pangkalan PSDKP Tual setingkat Eselon III.a. Peningkatan ini berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33/PERMEN-KP/2016 (ditegaskan kembali tahun 2017), sehingga unit ini memiliki kewenangan lebih besar dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal PSDKP.

